



Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Widayat Widayat
Assignment title: dosen manajemen
Submission title: STRATEGI PENGEMBANGAN SEKT.
File name: at_2008_Bestarri_Stretagi_Pengem...
File size: 96K
Page count: 11
Word count: 3,486
Character count: 23,018
Submission date: 26-Mar-2020 08:54AM (UTC+0700)
Submission ID: 1282208735

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM UPAYA
MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Widayat

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Oleh
Widayat
Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Malang

Agriculture is one of important sector in national economy as nutrition provider and local food. Although agricultural sector plays significant role in national economy, it has not been optimized. It is indicated by imported rice to fulfill the need of food. The rice fields which supported the nation's food do not show significant increase in food production. The growth of new settlements and infrastructures contribute to the agriculture lands decrease. Concerning to the problem, a comprehensive strategy that is intensification, to control the growth of settlements must be taken.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang pada 2008 memiliki penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Negara dengan penduduk yang besar, terlebih menyebar diberbagai daerah dengan potensi ekonomi yang berbeda-beda, penyediaan pangan secara cukup dan berkelanjutan adalah sangat penting. Betapa sangat pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, menjadikan pangan khususnya beras, bagi bangsa agraris ini, bukan lagi sekadar kebutuhan pokok tetapi juga merupakan komoditi strategis. Karenanya, upaya untuk mencapai swasembada pangan harus terus dilakukan oleh pemerintah demi menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami oleh suatu bangsa adalah apabila bangsa tersebut tidak mampu membangun sistem pengembangan pangan yang aman bagi penduduknya secara cukup dan berkelanjutan. Kekurangan pangan, kecukupan gizi dan kelaparan serta kemiskinan merupakan beberapa rangkaian persoalan bangsa terkait dengan pengembangan pangan yang memerlukan kebijakan strategis jika ingin persoalan tersebut teratasi.

Seiring dengan pembangunan nasional, dalam mengatasi persoalan pangan, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjamin tercukupinya kebutuhan pangan dibuat dalam suatu program yang disebut sebagai gerakan kemandirian pangan nasional. Gerakan ini ditujukan dalam jangka pendek untuk menjamin tercukupinya kebutuhan pangan nasional, sehingga tidak menggantungkan pangan/beras impor dari luar negeri.

1

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

by Widayat Widayat

Submission date: 26-Mar-2020 08:54AM (UTC+0700)

Submission ID: 1282208735

File name: at_2008_Bestarri_Stretagi_Pengembangan_Sektor_Pertanian_CAD.doc (96K)

Word count: 3486

Character count: 23018

**STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM UPAYA
MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

Oleh

Widayat

Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Malang

Agriculture is one of important sector in national economy, as nutrition provider and local food. Although agricultural sector plays significant role in national economy, it has not been optimized. It is indicated by imported rice to fulfill the need of food. The rice fields which supported the nation's food do not show significant increase in food production. The growth of new settlements and infrastructures contribute to the agriculture lands decrease. Concerning to the problem, a comprehensive strategy that is intensification, to control the growth of settlements must be taken.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang pada 2008 memiliki penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Negara dengan penduduk yang besar, terlebih menyebar diberbagai daerah dengan potensi ekonomi yang berbeda-beda, penyediaan pangan secara cukup dan berkelanjutan adalah sangat penting. Betapa sangat pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan, menjadikan pangan khususnya beras, bagi bangsa agraris ini, bukan lagi sekadar kebutuhan pokok tetapi juga merupakan komoditi strategis. Karenanya, upaya untuk mencapai swasembada pangan harus terus dilakukan oleh pemerintah demi menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Bukti sejarah menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami oleh suatu bangsa adalah apabila bangsa tersebut tidak mampu membangun sistem pengembangan pangan yang aman bagi penduduknya secara cukup dan berkelanjutan. Kekurangan pangan, kecukupan gizi dan kelaparan serta kemiskinan merupakan beberapa rangkaian persoalan bangsa terkait dengan pengembangan pangan yang memerlukan kebijakan strategis jika ingin persoalan tersebut teratasi.

Seiring dengan pembangunan nasional, dalam mengatasi persoalan pangan, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjamin tercukupinya kebutuhan pangan dibuat dalam suatu program yang disebut sebagai gerakan kemandirian pangan nasional. Gerakan ini ditujukan dalam jangka pendek untuk menjamin tercukupinya kebutuhan pangan nasional, sehingga tidak menggantungkan pangan/beras impor dari luar negeri.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pangan bukan tanpa dasar. Dasar pendekatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk (1) meningkatkan produksi pangan, (2) mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk sebagai konsumen pangan dan (3) meningkatkan pendapatan masyarakat yang berkemampuan dalam daya beli melalui perluasan kesempatan kerja sehingga kebutuhan pangannya bisa terjangkau.

Dari sisi yang lain, pemerintah juga melakukan berbagai upaya seperti (1). Memberikan subsidi baik dari sisi produksi maupun subsidi distribusi (2). Mengatur jumlah stock nasional dan mempertahankan harga yang tetap terjangkau oleh masyarakat, (3). Pemberian subsidi beras. Sistem ini telah berjalan bertahun-tahun namun belum mampu memberikan perubahan yang berarti.

Dampak dari kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah tercipta suatu kondisi ketergantungan yang amat besar kepada pemerintah serta ketahanan panganpun masih belum teratasi. Dari berbagai fakta masih dijumpai kerentanan terhadap pangan

Terlepas dari pro kontra, pemerintah telah mengambil langkah cukup berani dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional melalui impor beras. Dari berbagai publikasi pemerintah seringkali mengungkapkan neraca pangan dengan angka surplus. Tetapi kenyataannya setiap tahun Indonesia masih mengimpor beras dari beberapa negara produsen beras di Asia, seperti Thailand dan Vietnam.

Kebutuhan pangan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk jika tidak mampu dikendalikan, sementara pertumbuhan produksi pangan masih belum memadai, infrastruktur pertanian, bencana alam yang melanda lahan pertanian bersifat tak terkendalikan, adalah beberapa determinan yang memperkeruh persoalan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu perlu dibuat kebijakan yang terintegrasi. Dengan menyadari adanya kondisi tersebut di atas muncul sebuah pertanyaan besar, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Akankah selalu bergantung pada negara produsen beras, sementara Indonesia memiliki potensi yang cukup?

Kebutuhan Pangan Nasional

Pertumbuhan jumlah penduduk adalah suatu yang tidak dapat ditinggalkan. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun senantiasa terus bertambah. Pada 1999 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 194.755 ribu jiwa. Hanya berselang lima tahun kemudian jumlah penduduk tersebut telah menjadi 215.166 ribu jiwa. Sedangkan laju pertumbuhannya rata-rata sejak 2000 sebesar 1,26%.

Jika diasumsikan kebutuhan erkapitan beras sebesar 319,10 gram/kapita per hari, dalam kurun waktu yang sama Konsumsi beras mencapai 22.683.407 ton/th dan menjadi 24.840.531 ton/tahun pada 2004. Sementara ketersediaan dan kecukupan beras mengalami penurunan. Dari 34.301.029 pada 1999 tinggal 31.594.652 ton pada 2004. (BPS dan Sensus Pertanian, 2001) Angka ketersediaan mengalami penurunan sebesar 18,16%/th, selama lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 2003-2005 Jumlah konsumsi beras berfluktuasi, dari 116.497 ton/th, pada 2004 meningkat sebesar 8,35% dan pada 2005 mengalami penurunan menjadi hanya 115.059 ton/th. Berdasarkan proyeksi (Tambunan,2001) pada 2001 jumlah penduduk mencapai 218 juta jiwa dengan kebutuhan pangan beras sebesar 31,392 juta ton dan pada 2011 nanti jumlah penduduk diperkirakan mencapai 245 juta jiwa, kebutuhan akan pangan sebesar 35,280 juta ton.

Jagung juga menjadi salah satu produk pangan yang penting dan masih dikonsumsi sebagai makanan pokok atau sekedar sebagai campuran beras di beberapa daerah. Kebutuhan akan jagung rata-rata per jiwa per tahun sebesar 9,3Kg dan mengalami peningkatan pada tahun 2004 menjadi sebesar 9,36 kg/kapita. Jumlah konsumsi jagung sebesar 1.811,222 ton dan meningkat mencapai 2.013.486 ton pada tahun 2004. (<http://www.agrobisnis.go.id>)

Hal yang cukup menggembirakan adalah telah terjadi perubahan pola konsumsi beras dimasyarakat. Pada beberapa waktu lalu sebagian masyarakat Indonesia mengubah kebiasaan yakni dari kebiasaan makan nasi (beras) menjadi non nasi (non beras sentris). Namun kegembiraan tersebut segera sirna karena sekarang kebiasaan tersebut berubah atau bahkan berbalik arah dari non beras beralih ke beras (beras sentris) lagi

Sesuai dengan tuntutan atas kecukupan dan keterseediaan pangan yang memadai, maka produksi beras menjadi satu faktor penting. Jumlah produksi beras mengalami peningkatan, pada 2003 sebesar 197.432 ton menjadi 247.132 ton pada 2005. Sementara itu, luas areal produksi justru mengalami kenaikan dari 40.657 ha menjadi 44.319 pada 2005. (<http://www.pidie.go.id/download/9.htm>). Produksi beras nasional setiap tahun hampir tidak pernah bisa mencukupi jumlah tersebut. Produksi beras maksimal hanya sekitar 31,5 juta ton setiap tahun, belum lagi bila terjadi bencana, seperti banjir. Dengan kondisi ini tidak mengagetkan jika Indonesia mengalami defisit beras.

Menurut Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan (Tempo, 28 Mei 2004) berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003 merupakan puncak produksi tertinggi untuk tanaman pangan. Pada tahun 2004 produksi padi mencapai 52,1 juta ton, dan produksi jagung mencapai 10,91 juta ton. Sementara produksi tanaman kacang-kacangan seperti kedelai memperoleh 672 ribu ton, kacang tanah 784,79 ribu ton dan kacang hijau 334,51 ribu ton.

Dari tahun 1998 hingga tahun 2004 produktivitas tanaman jagung mengalami kenaikan 6,91 kw/ha atau naik sebesar 26,1%. Jumlah Produksi kotor tahun 1998 sebesar 10,169.488 ton dan pada tahun 2004 mencapai 11.182.788 ton (angka sementara). Namun demikian, luas panen jagung mengalami penurunan sebesar

12,8% dari 3.847.813 ha menjadi 3.354.256 ha. Sementara jumlah konsumsi jagung tahun 1999 sebesar 1.811.222 ton dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.013.846 ton atau naik sebesar 11,16%.

Lahan Petanian

Luas lahan menjadi satu faktor penting yang mendukung produktifitas pertanian. Data yang dikemukakan FAO (2004) menunjukkan bahwa perbandingan luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk dan luas lahan per kapita di Indonesia paling kecil dibanding dengan negara-negara lain.

Berdasarkan pada data lahan sawah irigasi dan nonirigasi, luas lahan per kapita Indonesia hanya sebesar 354 meter persegi, bahkan di bawah Vietnam yang mencapai 960 m persegi. Rasio luas lahan perkapita tersebut sangat jauh dibandingkan dengan Thailand yang mencapai 5.230.012. Bahkan, bila datanya berdasarkan luas lahan sawah ditambah lahan kering, tetap paling sempit, yaitu hanya mencapai 646 m. Dengan adanya pengalihan fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali jumlah lahan pertanian dari tahun ke tahun terus akan mengalami penurunan.

Menurut Data dari Departemen Pertanian (*Tempo*. 23 Desember 2003), dikemukakan bahwa, pada tahun 1997 luas lahan sawah kurang lebih 8,5 juta hektar. Sedangkan tahun 2000 mengalami penurunan menjadi 7,8 juta hektar. Dalam kurun waktu relatif pendek selama tiga tahun telah terjadi penurunan sebesar 0,7 juta hektar atau rata-rata 230 ribu/ha/tahun. Saat ini luas lahan pertanian hanya 11,7 juta hektar dan telah menyusut lagi menjadi 10.000.500 hektar.

2 Lahan pertanian tergarap untuk usaha tanaman bahan pangan yang 2 ini tersedia hanya 7,8 juta hektar lahan basah dan 6,43 juta hektar lahan kering. Dari lahan basah, yang memiliki prasarana irigasi teknis hanya 2,21 juta hektar; lahan beririgasi serangah teknis dan irigasi pedesaan sekitar 2,6 juta hektar; dan sisanya lahan tadah hujan, rawa lebak, dan lahan pasang surut.

Sebagai bahan perbandingan, Vietnam yang jumlah penduduknya hanya sekitar 80 juta jiwa memiliki lahan basah seluas 7,5 juta hektar. Thailand yang berpenduduk sekitar 65 juta orang memiliki luas lahan pertanian 31,8 juta hektar. China yang berpenduduk 1,3 miliar ternyata memiliki lahan pertanian yang sangat luas, mencapai 143,6 juta hektar (*Tempo Interaktif*, 2003).

Bibit Bermutu

Selain luas lahan, faktor yang berkontribusi terhadap produktifitas pertanian adalah ketersediaan bibit/benih. Ketersediaan benih berkualitas dari varietas unggul

merupakan masalah besar dalam sektor pertanian yang terintegrasi. Benih sebagai salah satu sektor industri hulu, mempunyai peran yang sangat strategis dalam peningkatan kinerja sektor pertanian pangan dan sekaligus peningkatan nilai tambah pertanian. Hal ini disebabkan benih bermutu selain merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas, juga akan mempengaruhi mutu hasil dan nilai ekonomis produk agribisnis tanaman pangan.

Kebutuhan benih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk tanam padi, setiap tahun (dua kali musim tanam) membutuhkan sekitar 74 juta ton dengan nilai sekitar Rp 21,00 triliun. Pada musim tanam tahun 2005 kebutuhan benih secara nasional mencapai 400 ribu ton. Sementara dari Data Ditjen Bina Produksi Tanaman Pangan menunjukkan, produksi benih berlabel (benih sebar dan benih berlabel merahjambu) pada padi, jagung (hibrida dan komposit) dan kedelai mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Rata-rata peningkatan produksi benih padi tiap tahun sebesar 2,29%, benih jagung sebesar 1,28%, dan peningkatan kedelai mencapai 0,71 %.

Sekalipun benih menjadi satu faktor kunci dalam menunjang produktivitas pertanian, namun penyediaan benih berkualitas di Indonesia masih banyak menemui kendala. Hal ini disebabkan usaha benih memiliki risiko tinggi namun keuntungannya rendah. Selain itu juga disebabkan oleh proses untuk menghasilkan varietas unggul juga memiliki standar dan sertifikasi yang berlaku secara internasional.

Sertifikasi dan standarisasi benih yang bermutu, merupakan hal yang sangat perlu mendapatkan perhatian. Terlebih lagi jika ingin mengembangkan perusahaan industri benih yang tangguh sebagai lokomotif usaha agribisnis sehingga terwujud agroindustri nasional yang tangguh pula. Usaha pembenihan di Indonesia masih menghasilkan benih yang berkualitas dalam jumlah yang sangat terbatas. Sebagaimana dikemukakan Prof Dr H Achmad Baihaki bahwa salah satu pendorong mewujudkan industri benih yang tangguh diperlukan divisi *Research and Development* (R&D).

Dengan usaha pembenihan yang ada saat ini, diharapkan akan mampu memproduksi varietas- varietas unggul bermutu yang baru, sehingga efisiensi perusahaan menjadi tinggi. Sementara usaha benih nasional masih bersifat penangkaran, dan tidak memiliki divisi R&D, serta kemampuan untuk menghasilkan varietas unggul yang baru masih sangat terbatas

Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Defisit kebutuhan beras nasional bisa diatasi dengan beberapa cara. Cara pemenuhan kebutuhan beras dapat dilakukan melalui sisi pasar penawaran dan atau sisi permintaan pangan (beras). Dari sisi permintaan dapat dilakukan dengan cara menjaga permintaan atau konsumsi pangan beras berada pada kondisi jumlah pada rentang tertentu. Konsumsi beras dikendalikan sehingga tidak terjadi konsumsi yang berlebihan (ineffisien) namun juga tidak kekurangan.

Pengendalian konsumsi ini, dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beras atau nasi bukan satu-satunya sarana untuk mencukupi kebutuhan gizi tubuh manusia. Masih banyak bahan pangan lainnya yang bisa dikonsumsi dan bahkan nilai gizinya juga tidak kalah. Sekalipun strategi ini dalam jangka pendek tidak bisa dilakukan, namun dalam jangka panjang perlu ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Persoalannya adalah "budaya nasi" telah mengakar kuat di masyarakat. Masyarakat masih merasa belum makan, jika belum ada nasi, sekalipun telah makan satu porsi misalnya.

Gslanturi (2002) mengemukakan bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi beras. Korea misalkan, sewaktu mengalami masalah defisit pangan dipecahkan antara lain dengan "gerakan tidak mengonsumsi beras dua hari dalam sebulan". Bila gerakan ini ditiru oleh Indonesia paling tidak didapatkan gambaran berapa penghematan pangan yang bisa diraih. Ambil saja, misalkan konsumsi beras 0,4kg/orang per hari yang dapat dihemat sebesar 0,4 kg 2 x 12 9,6 kg. Bila 50% penduduk Indonesia mengikuti gerakan tersebut, maka selama setahun -r dihemat sekitar 100.000 ton.

Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan mengonsumsi pangan dengan bahan dasar nonberas dan diversifikasi. Diversifikasi hendaknya Bukan merupakan keterpaksaan, tetapi harus menjadi menu harian rutin penduduk. Bahkan masyarakat di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Madura bisa digunakan sebagai pelopor dari gerakan ini. karena mereka sebenarnya tidak asing dengan menu nonberas tersebut. Jika hal ini ditiru oleh daerah lain maka penghematan konsumsi beras akan semakin besar.

Pendekatan dari sisi penawaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, memenuhi kebutuhan pangan beras dengan tanpa melakukan produksi sendiri, yakni melalui impor dari negara produsen beras. Cara impor memang paling mudah dilakukan. yakni dengan menyiapkan dana secukupnya atau dengan membuat perjanjian utang kepada negara produsen beras. Dengan kondisi bisnis beras dunia yang ada, seringkali harga beras impor lebih murah jika dibandingkan dengan harga beras produksi dalam negeri.

Pada 1998 jumlah ekspor beras mencapai 0,018 juta ton dan pada 2005 sebesar 0,084 juta ton. Sementara volume import beras dalam kurun waktu yang sama mengalami penurunan dari 2.900 juta ton tinggal hanya sebesar 0,122 juta ton. Sekalipun import beras mengalami penurunan, namun kondisi neraca perdagangan ekspor-import Beras Nasional pada 1998 sebesar negatif 2,882 juta ton dan pada 2005 menjadi negatif 0,38 juta ton. Rata-rata impor beras sampai 2005 sebesar 13,1 juta ton/tahun.

Sekalipun mudah dilakukan kebijakan melakukan impor beras bukan tanpa persoalan. Secara makro ekonomi impor akan mempengaruhi tingkat inflasi, demikian juga impor beras. Belum lagi aspek sosial kepada petani. Impor beras pada 2007, misalnya berpengaruh sebesar 0,7 persen pada inflasi dan pada Desember 2006 sebesar 0,49 persen.

Impor beras bukan sesuatu yang tabu, sekalipun demikian kebijakan hendaknya ini akan digunakan kalau tidak mendesak, dan impor merupakan instrumen untuk menstabilkan pengadaan dan harga di dalam negeri. Persoalan lain adalah, apakah Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 200 juta dan akan terus bertambah, akan terus-menerus menggantungkan kebutuhan pokok pangan pada negara lain?

Kedua, dengan cara memacu atau peningkatan produksi beras di dalam negeri. Kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini, memacu peningkatan produksi beras memang masih sulit dilakukan. Meningkatkan produksi beras dalam negeri, dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan atau intensifikasi.

Ekstensifikasi atau meningkatkan luas tanam hampir tidak mungkin dilakukan lagi di Indonesia. Lahan subur di Pulau Jawa yang sangat cocok untuk pertanian sawah, saat ini keberadaannya semakin menyempit. Konversi fungsi lahan dari tanah sawah ke nonsawah menjadi sebab utama. Lahan subur yang beberapa puluh tahun yang lalu sangat cocok ditanami padi, sekarang sudah menjadi areal pemukiman penduduk dengan pertumbuhan yang relatif sangat cepat pula.

Pengembangan sawah di luar Pulau Jawa pernah dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan melakukan konversi lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan. Tetapi karena lahan gambut bukan lahan yang baik untuk bertanam padi sawah, maka hasilnya sampai saat ini masih belum optimal.

Peningkatan produksi beras dengan cara intensifikasi masih mungkin dilakukan. Hal ini bisa dilakukan agar produksi padi meningkat. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa produktivitas padi cenderung meningkat. Pada tahun 1998 produktivitas padi sebesar 4,2 ton/ha, dan mengalami peningkatan hingga

mencapai 4,54 ton/ha pada tahun 2004 (PBS 2004). Bahkan, pada 2006 produktifitas padi intensifikasi mengalami peningkatan sebesar 0,81%. Pertumbuhan produksi padi pada 2001-2006 sebesar 0,9%. pada hal pada 1990-2000 sebesar 1,47%/th dan periode sebelumnya sebesar 4,3%/tahun. Sekalipun produktifitas padi mengalami kenaikan konsumsi juga mengalami kenaikan bahkan dengan presentase lebih besar dari kenaikan produktifitas.

Kebijakan pemerintah berupa gerakan kemandirian pangan nasional, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi adalah keputusan yang tepat. Implementasinya dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, senantiasa berupaya menciptakan kondisi agar harga produk tanaman pangan wajar dan terjangkau. Dalam artian bahwa harga produk pertanian yang berlaku dapat menutup biaya produksinya serta para petani dapat hidup layak. *Kedua*, mencukupi kebutuhan semua sarana produksi pertanian yang bermutu, mulai dari bibit bermutu dan lain sebagainya, dengan harga yang terjangkau.

Reposisi Bidang Pertanian

Bidang pertanian merupakan sebuah sub sistem ekonomi yang terkait dengan bidang lainnya. Jika ditelisik secara mendalam, produk pertanian memegang peran strategis terhadap hajat hidup masyarakat banyak sebagai penyedia kebutuhan pangan. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat mengindikasikan bahwa kinerja di bidang pertanian dan sekaligus tingkat kesejahteraan bangsa belum tercapai.

Dengan kinerja yang dihasilkan oleh bidang pertanian selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam memajukan bidang pertanian masih belum optimal. Hal ini dapat dibandingkan dengan peranan langsung maupun tidak langsung pemerintah pada bidang nonpertanian, misalkan sektor telekomunikasi, pertambangan, bidang pertanian masih ketinggalan jauh.

Indikator kinerja bidang pertanian yang lain indikator kinerja bidang pertanian yang lain dapat dilihat dari kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB Nasional. Kontribusi sektor pertanian dari 2003-2005 pada PDB nasional hanya sebesar 15,24 % - 14,54%, lebih rendah dari sektor jasa yang mencapai sebesar 16,26 %-16,83% dari total sebesar Rp.1.577.171,30- Rp.1.749.576,90 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pertanian optimal.

Jika posisi sektor pertanian dikaitkan dengan apa yang disebutkan dalam UUD 45, baik yang belum maupun yang sudah ³diamandemen pada pasal terkait dengan kesejahteraan, disebutkan bahwa bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, maka muncul pertanyaan dimana posisi bidang pertanian dalam sistem perekonomian nasional?

Dalam sejarah perekonomian Indonesia periode 1950-an sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup baik. Pada periode 2000-an sektor pertanian pertumbuhannya jauh lebih rendah dari pada sektor (Tambunan, 2001). Sekalipun posisi sektor Pertanian dilihat dari sumbangan PDB nasional Masih relatif lebih rendah dibanding beberapa Sektor lainnya, namun sektor ini memiliki peran yang strategis terhadap penguasaan hajat hidup orang banyak. Peningkatannya, mengapa justru sektor ini kurang mendapatkan perhatian dan bahkan justru ditelantarkan

Investment *linkage* antara pertanian dan non pertanian sangat diperlukan. Agar peranan sektor pertanian tersebut dapat direalisasikan perlu pemenuhan beberapa kondisi yakni: (1) petani harus menjual sebagian outputnya keluar sektor atau menciptakan market surplus dari produk pertanian (2). Para petani harus menjadi net saver, yakni pengeluaran konsumsi mereka harus lebih kecil dari pengeluaran produksinya dan (3). Tabungan para petani harus lebih besar dari pada kebutuhan investasi di sektor pertanian.

Pemberdayaan BUMN-Pertanian

Indonesia memiliki BUMN yang bergerak di sektor pertanian, yakni PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri. Kedua BUMN tersebut perlu diberdayakan lebih optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pemberdayaan BUMN pertanian tersebut diwujudkan dalam suatu reformasi strategi pengembangan.

Reformulasi strategi pengembangan adalah sebuah upaya yang bijak dalam mewujudkan Agro Industri Nasional (AGROINAS) yang tangguh. Reformulasi strategi tersebut memiliki tujuan: (1) untuk mendukung terjaminnya kebutuhan pangan nasional, (2) untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara umum. Namun, untuk mencapai kedua tujuan tersebut dihadapkan pada kondisi yang kurang kondusif yakni semakin menurunnya luas lahan pertanian dan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.

Berdasarkan peluang yang ada dan tujuan yang ditentukan tersebut, ada beberapa faktor kunci yang perlu mendapatkan perhatian. Faktor kunci tersebut diformulasikan dalam sebuah strategi pendekatan *Input-Proses-Output* yang dirinci yakni *Leadership, Relevance, Atmosphere of Internal Business, Internal Organization, Sustainability* dan *Efficiency*.

Rumusan strategi tersebut memiliki tujuan antara (*Intervening Objectives*) yakni; 1) dihasilkannya benih unggul (hibrida). Dengan terciptanya benih hibrida maka diharapkan produktivitas pertanian akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran petani, 2) perluasan kapasitas produksi benih. Dengan perluasan kapasitas ini maka pasar benih unggul yang akan dapat dilayani semakin

luas. Jika semakin banyak petani menggunakan benih unggul maka produktifitas petani akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas pertanian secara agregate.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas dibutuhkan reformulasi strategi pengembangan sebagai berikut: 1. Strategi peningkatan kinerja kepemimpinan (*leadership*) keorganisasian melalui pengembangan mekanisme kerja organisasi (*tstandar quality code*). 2. Strategi peningkatan relevansi (*relevance*) melalui program peningkatan mutu output yakni sarana produksi pertanian (benih dll) yang berbasis pasar dan potensi yang relevan. 3. Strategi peningkatan atmosfir bisnis Internal (*atmosphere of internal busniness*) melalui pengembangan sistem usaha yang harmonis pada internal perusahaan, hubungan perusahaan dengan penyalur (pelanggan sekunder) dan hubungan perusahaan dengan pelanggan primer (petani). 4. Strategi peningkatan manajemen dan organisasi internal (*internal management and organization*) melalui pengembangan sistem manajemen kontrol. 5. Strategi peningkatan keberlanjutan (*sustainab ility*) melalui program peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan kuantitas serta kualitas *raw input* melalui hubungan baik mitra bisnis (penangkar, penyalur dan petani). 6. Strategi peningkatan efisiensi (*efficiency*) melalui aktivitas program peningkatan efektifitas proses, pemberdayaan aset dan program peningkatan kemampuan daJarn bidang Teknologi pembenihan, Riser dan Pengembangan.

Penutup

Sebagai akhir tulisan ini dapat dibuat suatu simpulan bahwa kebutuhan pangan secara nasional akan semakin meningkat sementara jumlah produksi akan cenderung semakin menurun dikarenakan luas lahan yang semakin sempit. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan pangan bisa dilakukan dengan pendekatan sisi produksi atau konsumsi.

Pendekatan dari sisi konsumsi dilakukan dengan melakukan diversifikasi pangan memobilisasi masyarakat untuk merubah pola konsumsi pangan dengan bahan dasar beras ke nonberas. Sedangkan pendekatan dari sisi produksi dilakukan dengan meningkatkan produksi pangan beras melalui ekstensifikasi atau intensifikasi. Untuk mendukung program peningkatan produksi pangan beras perlu diberdayakan kembali perusahaan Negara yang bergerak disektor pertanian dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana pangan secara terjangkau oleh petani.

Daftar Pustaka

- Basri, Faisal. ³ *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Keangkatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangan. 2002.
- Colander, David ³ *C.Macroeconomics*. Third Edition, Boston. Irwin McGraw-I-UII. 1998.

Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.

Hadi, Syamsul, JaslimRio Syahrial, Edi Jepri, Arianti Vidia, Damayanti Dwidia P. D.,
Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF. Jakarta: Granit. 2004.

Johnson Norman, 1999, *Mixed Economies of Welfare*, Prentice Hall Europe., 1999

Karl E. Case dan Ray C. Fair. *Principles Of Economics*. Sixth Edition, New York.
Prentice Hall International Inc. 2002.

King, David K *Fiscal Tiers: The Economics of Multylevel Government*. London:
George Allen & Unwin, 1984

Koncoro, Mudrajad. "Dr Hal Hill dan Ekonomi Indonesia", *Republika*, 2 Oktober
1996.

Saparini, Hendri. "Kinerja Ekonomi 2007 Kebijakan Lepas Tangan Mendominasi",
Suara Karya, 27 Desember 2007.

Tarnbunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta:
Ghalia Indonesia. 2001.

Yustika, Ahmad Erani. *Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi & Kebijakan*,
Bayumedia. Malang: Bayurnedia. 2005.

Tempo. 23 Desember 2003

----- . 28 Mei 2004

STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DALAM UPAYA MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.neliti.com

Internet Source

4%

2

dunialivelihood.blogspot.com

Internet Source

3%

3

dwiefa.blogspot.com

Internet Source

2%

4

www.gizi.net

Internet Source

2%

5

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On